



Gratifikasi Libatkan Pejabat Eselon 3



Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Kalau memang terjadi pelanggaran, pasti juga ada sanksinya."

SINGGIH RAHARJO

Pj Wali Kota Jogja



Kemarin infonya malah ada tuduhan jangan-jangan OPD lain ada juga. Nah, ini informasi baru bagi kami yang harus kami identifikasi dulu. Tentu tidak bisa gegabah, *bener gak sih kayak gitu apa yang dituduhkan.*"

FITRI PAULINA ANDRIANI

Inspektur Kota Jogja

Inspektur Targetkan Kasus di Satpol PP Selesai Bulan Ini

JOGJA, Radar Jogja - Kasus gratifikasi yang melibatkan pejabat eselon tiga di tubuh Satpol PP Kota Jogja, dibenarkan oleh Inspektur Kota Jogja Fitri Paulina Andriani. Permasalahan ini ditargetkan selesai bulan ini ■

► Baca *Gratifikasi...* Hal 7

FOTO: WULAN YANUARWATI/RADAR JOGJA, GRAFIS: HERPRI KARTUNI/RADAR JOGJA

Gratifikasi Libatkan Pejabat Eselon 3

Sambungan dari hal 1

"Kami upayakan bulan ini selesai, bisa naik ke Pak Pj (Penjabat Wali Kota Singgih Raharjo, *Red*)," tegasnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Jogja, kemarin (23/5). Penyimpangan yang terjadi dibenarkan Paulina. Selain rekomendasi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku, juga bakal ada perbaikan pengelolaan di tubuh Satpol PP Kota Jogja.

"Masih proses *nji*, nunggu laporan terbit saja. Memang intinya, substansi yang dilaporkan itu ada benarnya. Ini baru kami proses kemudian. Mudah-mudahan kami selesaikan bulan ini," jelasnya.

Paulina menyebut, masalah itu sudah masuk proses audit investigasi. Sudah masuk dalam proses konfirmasi dan klarifikasi. "Selanjutnya pelaporan ekspose, kemudian penyusunan laporan," tambahnya.

Sedangkan pihak yang dilaporkan statusnya masih terus bekerja. Yang bersangkutan telah dipindahkan dari Satpol PP Kota Jogja sekitar bulan Februari 2023 ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

"Kalau tidak salah sudah dipindahkan dari Satpol PP. Ke perangkat daerah lain. Setingkat eselon tiga, kalau *gak* salah ya," ujarnya.

Soal kasus serupa di tubuh OPD yang lain, Paulina tidak banyak berkomentar. Sebab,

INSIGHT

harus dilakukan investigasi terlebih dahulu.

"Kemarin infonya malah ada tuduhan jangan-jangan OPD lain ada juga. Nah, ini informasi baru bagi kami yang harus kami identifikasi dulu. Tentu tidak bisa gegabah, *bener gak sih* kayak gitu apa yang dituduhkan," jelasnya.

Pendalaman akan terus dilakukan di OPD lain, tidak hanya di tubuh Satpol PP Kota Jogja. Dia menegaskan perbaikan dan pengelolaan di tubuh OPD lain juga perlu dilakukan. Baginya, itu hal krusial.

Kalau ada hal yang tidak beres *kan* harus segera di-

benahi. Yang penting pembenahan, pengelolaannya secara keseluruhan. Mungkin tidak hukuman disiplin satu dua orang, tapi secara keseluruhan tata kelola harus diperbaiki. Karena yang lebih penting itu tata kelola dan manajemen risiko harus dikuatirkan," tandas Paulina.

Sebelumnya, anggota Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba meminta Inspektorat Kota Jogja tegas dalam memeriksa kasus dugaan gratifikasi pekerja *outsourcing* Satpol PP Kota Jogja.

"Jika memang ditemukan adanya pelanggaran hukum berupa gratifikasi, maka sanksi tegas diberikan tanpa pandang bulu," ujarnya. Kamba mendorong pe-

meriksaan dugaan gratifikasi pada pekerja *outsourcing* di Satpol PP Kota

Jogja ini dapat menjadi pintu masuk bagi Inspektorat untuk menulusr

dugaan gratifikasi penerimaan tenaga kontrak di OPD lainnya. (*lan/laz/hep*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005